BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)-Pemerintah Kota Cimahi dan termasuk kedalam kategori berpengaruh cukup, artinya menunjukkan ketika Anggaran Berbasis Kinerja memberikan implementasi yang baik, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin baik pula. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah /kendala seperti :
    a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan Anggaran Berbasis Kinerja .
    b. Masih terdapat pegawai yang cukup kesulitan dalam melaksanakan /menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ,dengan kurang nya informasi yang diberikan oleh manajer .

2. Sistem Pelaporan Keuangan positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)-Pemerintah Kota Cimahi dan termasuk kedalam kategori berpengaruh cukup, artinya semakin baik diterapkannya Sistem Pelaporan Keuangan maka tentu akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD di Kota Cimahi semakin baik pula. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena memiliki beberapa masalah/kendala seperti:
    a. Lemahnya pembinaan pegawai dalam melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
    b. Masih adanya pegawai yang tidak menjunjung integritas dan etika serta tanggungjawab atas sistem pelaporan keuangan di kantor tersebut.

5.2 Saran

Setelah penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. BPKAD diharapkan dapat meningkatkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja agar mencapai target kinerja yang optimal mengacu kepada kegiatan-kegiatan dan program-program yang di biayai secara jelas termasuk efisiensi dan efektif. menambah ketersediaan sumber daya manusia diperlukan penambahan *slot* penerimaan/seleksi pegawai. Namun perlu diperhatikan, alih-alih menambah kapasitas penerimaan/seleksi pegawai kemudian dinaikkan jumlah penerimaannya, namun tidak diiringi dengan seleksi yang baik. Tentu pada hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan tetap menemui masalah. Untuk itu, seraya menambahkan kapasitas penerimaan pegawai, diperlukan pula seleksi sumber daya manusia yang baik dan yang sangat berkompetensi pada bidang yang dibutuhkan.

2. BPKAD harus berupaya meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan yang mengacu pada standar yang ada dengan memberikan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan pembukuan dengan basis akuntansi akrual sepenuhnya kepadaseluruh pegawai BPKAD agar dapat lebih memahami dan mendalami aturan dalam pengelolaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan diperlukan pengawasan dan pengendalian yang memadai guna mengontrol/menjaga sumber daya manusia agar terhindar dari perbuatan menyimpang menuju ranah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sikap dan terintervensi negatif

sehingga merubah pencatatan/penyusunan laporan keuangan yang tidak *real*

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi Pengembang Ilmu

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu akuntansi sektor publik , serta kontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Anggaran berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

   Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengamatan dengan meneliti lebih dari satu pemerintahan seperti yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu hanya meneliti pemerintahan Kota Cimahi. Selain itu untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable-variabel lain nya yang menjadi faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu SEM PLS akan tetapi dengan unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.